

ABSTRAK

UPAYA PENERAPAN ASESSMENT TERPADU TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Pada BNN Provinsi Lampung)

**Oleh
Brenda Sita Simeramisna**

Negara bertanggungjawab dalam pemberantasan kejahatan narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam upaya pemberantasan kejahatan ini dibentuknya Badan Narkoba Nasional ini dikarenakan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba telah merajalela di masyarakat maupun pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional Pasal 2. Setelah dilakukan diskusi pada Peraturan Bersama melahirkan sebuah Program Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari beberapa tim. Tim yang dimaksud antara lain Tim Dokter dan Tim Hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu.

Penelitian ini difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan runutan metode ilmiah berdasarkan sumber hukum yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) melalui 3 narasumber utama di BNN Lampung. Setiap informasi dikolektifkan dan dibuatkan analisis yang dilakukan TAT BNN Lampung yang berkaitan dengan proses pelaksanaan asesment dan prosedur-prosedur yang harus sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang kemudian diatur lebih lanjut dengan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Proses yang dilakukan oleh TAT dilakukan dengan beberapa tahapan seperti pengumpulan informasi dengan mengajukan berkas-berkas terhadap sekretaris

dan ditinjau dari segi hukum dan segi medis oleh masing-masing tim. Pelaksanaan proses asesmen terpadu ini tidak membutuhkan waktu yang lama, hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur kerja tim asesmen terpadu yang diatur dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Berdasarkan beberapa analisis yang ditekuni, setelah mengurus segala jenis persyaratan hukum pada proses assesment, aparat hukum menetapkan penjara sebagai salah satu bentuk hukuman yang layak untuk memberikan efek jera pada pelaku. Sehingga, Penerapan hukum yang terjadi di BNN Lampung terkait dengan TAT dan pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tahapan di atas adalah bentuk penerapan Tim Asessment Terpadu (TAT) yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung. Setelah dilakukan analisis dengan seksama, BNN Provinsi Lampung telah menerapkan beberapa tahapan dan proses yang harus dilakukan oleh TAT berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan disesuaikan dengan PP No. 25 tahun 2011. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa BNN Provinsi Lampung telah sesuai pada penerapan TAT penyalahgunaan narkotika golongan 1 dari diri sendiri.

Saran dari penelitian ini adalah Tim Asesmen Terpadu diharapkan mampu mengatasi berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan proses asesmen terpadu dengan meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah agar terbentuk sinergitas yang baik dalam pelaksanaan asesmen terpadu. Selain itu, dapat mentaati seluruh prosedur yang ada dalam undang-undang pada pelaksanaan penyalagunaan narkotika golongan 1 dengan maksimal.

Kata Kunci : ***Narkotika, Tim Assesment Terpadu, BNN Lampung, Golongan 1, Penyalahguna.***

ABSTRACT

EFFORTS TO IMPLEMENT AN INTEGRATED ASSESSMENT TOWARDS GROUP of NARCOTICS ABUSE OFFENDERS FOR ITSELF (Case Study : National Narcotics Agency (BNN) Lampung)

By

Brenda Sita Simeramisna

The state is responsible for eradicating narcotics crimes. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of pain and can cause dependence. In an effort to eradicate this crime, the National Narcotics Agency was formed because the distribution and abuse of narcotics has become rampant in society and government. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2010 concerning the National Narcotics Agency Article 2. After discussions on the Joint Regulation, an Integrated Assessment Team Program was born, consisting of several teams. The teams in question include the Medical Team and the Legal Team which are tasked with carrying out an analysis of the role of suspects arrested at the request of investigators relating to illicit drug trafficking, especially for addicts.

This research is focused on the efforts made by the Integrated Assessment Team (TAT) in handling the perpetrators of class 1 narcotics abuse for themselves. This research was conducted using a scientific method approach based on legal sources written in legislation (Law in Books) through 2 main sources at BNN Lampung. Each information is collected and an analysis is made by TAT BNN Lampung relating to the process of conducting assessments and procedures that must be in accordance with Law No. 35 of 2009 concerning narcotics which is then further regulated by PP No. 25 of 2011 concerning the Implementation of Mandatory Reporting of Narcotics Addicts.

The process carried out by TAT is carried out with several stages such as information gathering by submitting files to the secretary and reviewed from a legal and medical perspective by each team. The implementation of this integrated assessment process does not require a long time, this is in accordance with the provisions regarding the work procedures of the integrated assessment team stipulated in article 14 paragraph (3) of the Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Suspects And / Or Defendants of Narcotics Addicts And Victims of Narcotics Abuse Into Rehabilitation Institutions. Based on some analysis, after taking care of all types of legal requirements in the assessment process, the legal apparatus determines prison as a form of punishment that is appropriate to provide a deterrent effect on the perpetrator. Thus, the application of the law that occurs at BNN Lampung related to TAT and the perpetrators of class 1 narcotics abuse is in accordance with applicable law. The above stages are a form of application of the Integrated Assessment Team (TAT) at the National Narcotics Agency (BNN) Lampung Province. After careful analysis, the Lampung Provincial BNN has implemented several stages and processes that must be carried out by TAT based on Law No. 35 of 2009 and in accordance with PP No. 25 of 2011. The results of this study prove that the Lampung Provincial BNN is in accordance with the application of TAT for class 1 drug abuse from oneself.

The suggestion of this research is that the Integrated Assessment Team is expected to be able to overcome various factors that hinder the implementation of the integrated assessment process by increasing cooperation between law enforcement officials and government agencies in order to form good synergy in the implementation of integrated assessments. In addition, it can comply with all procedures in the law on the implementation of the use of class 1 narcotics to the maximum.

Keywords: *Narcotics, Integrated Assessment Team, BNN Lampung, Group 1, Abuser.*